

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah menjadi sebuah fenomena di dunia finansial terlebih sistem yang dipakai sangat berbeda dengan bank konvensional (Subaweh, 2008), bank syariah turut disebut sebagai jawaban atas buruknya sistem perbankan di seluruh dunia. Kinerja perbankan syariah memiliki andil yang besar terhadap perkembangan perekonomian khususnya di Indonesia sendiri, tepatnya ketika krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Sistem pembiayaan yang *basic* prinsip syariah mampu untuk berdiri tegap dan masih bisa memiliki kinerja yang lebih baik dan optimal ketimbang bank konvensional. (Subaweh, 2008).

Keberadaan Bank Syariah diharapkan mampu mewujudkan sistem perbankan yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. (Juliana, 2013).

Inovasi produk merupakan sebuah aspek yang turut memicu sebuah perkembangan perbankan syariah menuju sebuah kemajuan. Hal ini menjadi sebuah kekuatan pada perbankan syariah untuk menjadi suatu bisnis perbankan syariah yang baik, kreatif dan mampu untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Sejalan dengan inovasi tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Buku Daftar Produk Perbankan Syariah dengan jumlah produk terdiri dari 29 jenis. Di buku tersebut terdapat satu produk yang pada dasarnya produk tersebut hanya bisa dipasarkan oleh perbankan syariah dan tidak bisa dipasarkan oleh bank konvensional, nama produk tersebut adalah gadai emas syariah (www.bi.co.id, 2013).

Kreativitas perbankan syariah dalam hal membuat produk maupun adaptasi produk yang dibutuhkan pasar tidak hanya memicu perkembangan perbankan syariah secara signifikan. Di sisi lain mengundang perdebatan seputar kesesuaian syariah dari produk-produk hasil inovasi dari bank syariah, termasuk diantaranya gadai emas syariah. (Nisa, 2013).

Pada umumnya gadai emas di perbankan syariah ini menggunakan tiga akad yaitu *Qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Kehawatiran muncul kepada para bankir terhadap produk *rahn* yang bukan merupakan suatu aset produktif dalam menghasilkan laba. Dalam hal tersebut bank syariah mendapat keuntungan dari upah pemeliharaan barang gadai. (Hakim, 2011).

Ayat Al-Qur'an yang menjadi sebuah dasar hukum mengenai perjanjian gadai ini adalah berada dalam firman Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي أُوْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَأَلْتَقَى اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Qardh dalam rangka *rahn* adalah suatu akad pemberian pinjaman dengan dana tanpa memungut imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara langsung atau dengan cicilan dalam rangka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya biaya untuk pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*. (Masya, 2003).

Dalam perkembangannya produk *Qardh* beragun emas tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bank Indonesia. Di mana bank syariah mulai mengombinasikan gadai dengan pembiayaan kepemilikan emas yang dikenal dengan beli gadai emas yang mengandung spekulatif. Setidaknya terdapat 5 (lima) resiko yang dihadapi bank syariah dalam menjalankan gadai emas yaitu *Market risk* (resiko pasar *Liquidity risk* (resiko likuiditas), kemudian *Capital risk* (resiko modal), kerugian karena penurunan harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan *Capital Adequet Ratio* (CAR). Credit risk (resiko kredit), penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah debitur. *Reputation risk* (resiko reputasi), maraknya *Qardh* untuk rahn emas dan berkebun emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil. Pelaksanaan produk *Qardh* beragun emas yang diatur dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS Tahun 2012. Tujuan penggunaan gadai emas hanya untuk membiayai keperluan dana jangka pendek. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. *Financing To Value* (FTV) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. (Humairah, 2014).

Permasalahan muncul ketika imbalan pemeliharaan ini berupa persentase dari pinjaman yang diberikan, sebagaimana praktik di perbankan. Karena hal ini para ulama di Dewan Syariah Nasional (DSN) sepakat tidak setuju karena uang yang dikeluarkan gadai adalah pinjaman, sedangkan pinjaman yang mewajibkan imbalan dalam bentuk persentase merupakan kredit berbunga yang diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu maka telah disepakati agar upah tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman tetapi dengan nilai emas yang digadaikan (Hakim, 2011).

Ulama Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i mendefinisikan akad *rahn* yaitu menjadikan materi berupa barang sebagai bentuk jaminan untuk hutang yang bisa dijadikan pembayar untuk hutang apabila orang yang berhutang tersebut tidak bisa membayar hutangnya itu". (Masya, 2003).

Penelitian mengenai gadai telah dilaksanakan sebelumnya oleh Soraya (2010) dan Mukaromah (2008). Pada penelitian Mukaromah (2008), penelitian tersebut membahas mengenai operasional gadai di Pegadaian Syariah kantor cabang serta mengkaji hukum Islam terhadap alur mekanisme operasionalnya. Hasil dari penelitian di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Landungsari tersebut telah membuahkan hasil yaitu suatu mekanisme operasional gadai di pegadaian syariah yang terdiri dari dua akad, pertama akad *rahn* dan kedua akad *ijarah*.

Barang yang dijadikan sebagai objek gadai yaitu berupa barang yang bergerak yaitu emas dan berlian. Mekanisme gadai disini pertama dimulai dari permohonan gadai, kemudian pembayaran gadai dan terakhir pelelangan barang gadai. Penelitian selanjutnya yaitu Soraya (2010) yang melaksanakan penelitian kesesuaian pelaksanaan akad dan perhitungan biaya *ijarah* dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 serta faktor yang mempengaruhi perbedaan tarif *ijarah* di Pegadaian. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan akad menggunakan akad *ijarah* dan *rahn*. Selanjutnya biaya *ijarah* yang diterapkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah.

Kemudian penelitian dari Soraya (2010), Mukaromah (2008), Heri (2017), Arif (2013), Adib (2014), Hanuri (2015), Ariyanti (2014), Herpen (2015), dan Mulazid (2012), terdapat beberapa kendala yang menjadi penghalang yaitu masih lemahnya sistem syariah sebagai sistem keuangan dan menjadi sebuah tantangan baginya. Selanjutnya kebijakan pemerintah mengenai gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah.

Bank BRI Syariah melakukan *spin off* dengan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 19 Desember 2008. Faktor eksternal yang merealisasikan *spin off* BRI Syariah didukung dengan regulasi pemerintah melalui Undang-Undang No.21 tahun 2008. Selama tahun 2015 aset yang dimiliki BRI Syariah sebesar Rp.24,230 triliun dan laba yang sebesar Rp.122,637 miliar (Yunisa, 2016).

BRI Syariah adalah salah satu perbankan syariah yang melayani nasabah yang menggadaikan emas. Produk bank BRI Syariah yang khusus melayani penggadaian emas dinamakan Qardh Beragun Emas (QBE) BRISyariah iB. QBE adalah fasilitas pemberian pinjaman dana tanpa dikenakan margin dengan emas sebagai jaminannya, sekaligus memberikan fasilitas pemeliharaan atas emas yang dimiliki nasabah. Produk ini menggunakan akad *Qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Di BRI Syariah, produk layanan QBE merupakan produk layanan yang berdiri sendiri dan lepas dari rangkaian layanan pembiayaan konsumtif (*consumer*) yang dikelola oleh *Account Officer* (AO). (Yunisa, 2016).

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa terdapat masalah penentuan biaya *ijarah* dalam gadai emas tersebut, baik dari segi perhitungannya maupun dari segi jenis-jenis biaya yang dimasukkan seperti biaya asuransi dan lain sebagainya, perlu sekiranya melakukan penelitian kesesuaian mengenai *rahn* (gadai syariah) antara praktik dan hukum yang dikeluarkan oleh DSN-MUI di bank syariah, mengingat perbankan syariah merupakan pelopor dalam mengeluarkan produk gadai syariah ini. Untuk itu penulis akan mengImplementasi atau meneliti kembali penerapan akad QBE di BRI Syariah dengan judul **“Implementasi *Sharia Compliance* pada Produk Qardh Beragun Emas (QBE) Dalam Persepsi Nasabah: Studi Deskriptif pada Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum”**

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini akan berfokus pada:

1. Terdapat indikasi produk *rahn* yang bukan aset produktif. Bank syariah mendapat laba dari pemeliharaan barang gadai dan ini tidak boleh. (Hakim, 2011).
2. Dalam memberi pinjaman, bank tidak meminta surat keterangan pemilik atau faktur pembelian emas saat nasabah pengajuan gadai emas. (Arif, 2013).
3. Kecenderungan nasabah mengutamakan tersier ketimbang primer dan sekunder, sehingga gadai emas bukan solusi mendapatkan dana, tapi menjadi investasi yang menguntungkan. (Yunisa, 2016).

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi produk *Qardh* Bearagun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum ?
2. Bagaimana persepsi nasabah terhadap *sharia compliance* pada produk *Qardh* Bearagun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum ?
3. Bagaimana analisis *sharia compliance* pada produk *Qardh* Bearagun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi produk *Qardh* Bearagun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KCP Citarum dan persepsi nasabah terhadap *sharia compliance* serta analisis *sharia compliance* pada produk *Qardh* Beagun Emas (QBE) berdasarkan fatwa DSN-MUI.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap bidang ekonomi, keuangan dan bisnis Islam secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah baru dalam praktik transaksi rahn sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam al-Qur'an, hadist, dan fatwa DSN MUI.

Adapun secara praktis, peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para *stakeholder* seperti perbankan syariah dalam mengimplementasikan produk rahn agar tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. .